



MENTERI PEKERJAAN UMUM

Keynote Speech

LOKAKARYA

PENATAAN RUANG SEBAGAI WAHANA UNTUK MEMINIMALKAN
POTENSI KEJADIAN BENCANA LONGSOR

JAKARTA, 7 MARET 2006

**Hadirin peserta lokakarya sekalian yang saya hormati,
Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua.**

Seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyambut baik permintaan untuk menyampaikan *keynote speech* pada acara Lokakarya Nasional bertajuk “Penataan Ruang Sebagai Wahana Untuk Meminimalkan Potensi Kejadian Bencana Longsor” ini yang diselenggarakan atas kerjasama Ditjen Penataan Ruang dengan Badan Kejuruan Sipil – Persatuan Insinyur Indonesia. Tema Lokakarya ini, merupakan isu yang sangat aktual dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi bangsa kita belakangan ini.

Sebagaimana kita ketahui kejadian tanah longsor dan juga banjir merupakan kejadian yang dalam beberapa bulan terakhir ini telah banyak menyita perhatian kita semua. Secara geografis, sebaran lokasi bencana tersebut tidak lagi terbatas hanya di wilayah tertentu saja, melainkan sudah hampir merata di seluruh nusantara; mulai dari banjir bandang di Kutacane, Propinsi

NAD; di bukit Lawang, Bohorok di Sumatera Utara; tanah longsor di Jember, Jawa Timur dan Banjarnegara, Jawa Tengah; di Lembang, Jawa Barat; hingga yang baru-baru ini terjadi di sekitar Menado dan Bitung di ujung utara Sulawesi.

Selama tahun 2005 saja, Departemen PU mencatat paling tidak terjadi 87 musibah longsor dan banjir yang tergolong besar di berbagai daerah, dimana 225 orang dinyatakan meninggal, 325 orang hilang, 42 ribu orang mengungsi dan lebih dari 7 ribu rumah hancur. Dalam konteks ke-PU-an, selain kerugian jiwa dan harta benda, bencana yang ada juga telah mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana umum yang ada, seperti yang terjadi pada 89 unit tempat ibadah, 48 jembatan, 23 bendungan, 11 ribu meter saluran irigasi, 10 ribu meter tanggul dan 716 kilometer jaringan jalan yang ada. Propinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan kejadian longsor terburuk di tanah air, yang banyak menelan korban seperti kejadian longsor di sekitar Lembang maupun di Kabupaten Majalengka.

Dari data mengenai bencana yang ada, umumnya penyebab kejadian longsor dan banjir lebih disebabkan antara lain terjadinya perubahan fungsi hutan lindung dan kawasan konservasi di bagian hulu, sehingga air yang terinfiltrasi ke dalam tanah menjadi berkurang dan air permukaan menjadi meningkat. Di sisi lain beberapa permukiman yang ada, dewasa ini juga banyak dibangun di kawasan perbukitan dengan kemiringan lereng lebih dari 40 persen yang seharusnya berfungsi lindung, dan kita sering dapati daerah bantaran dan sempadan sungai dikembangkan menjadi daerah budidaya dan permukiman. Kondisi tersebut secara global diperburuk dengan adanya efek rumah kaca akibat penggunaan bahan bakar yang berlebihan dan pengurangan luas ruang terbuka hijau yang ada, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pola iklim dan cuaca yang ada.

Peserta Lokakarya sekalian.

Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mengkaji peristiwa-peristiwa tersebut secara ilmiah sebelum kita memutuskan langkah dan tindakan apa yang harus kita lakukan ke depan untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa yang akan datang. Sebagai insinyur, tentu kita mengetahui bahwa kejadian banjir dan longsor tersebut sebenarnya

merupakan hal yang biasa dan dapat kita perkirakan sebelumnya. Lalu, timbul pertanyaan apa yang menjadi masalah?

Persoalan menonjol adalah menyangkut **frekuensi** dan **intensitas** kejadian bencana yang ada. Sebagaimana kita ketahui pola sebaran kejadian alam secara statistik umumnya mengikuti pola distribusi normal, dimana kejadian dengan intensitas rendah dan tinggi cenderung memiliki frekuensi yang rendah dan intensitas sedang memiliki frekuensi kejadian yang paling banyak. Demikian pula dengan data curah hujan, intensitas hujan yang rendah di musim kering maupun intensitas hujan yang sangat tinggi umumnya berulang dengan frekuensi yang tidak terlalu sering. Namun belakangan ini pola tersebut cenderung berubah. Pertanyaannya apakah kita masih akan menganggap semua kejadian longsor dan banjir merupakan **bencana alam**? Sebagai seorang insinyur sipil tentu kita akan menelaah bahwa apabila pola kejadiannya tidak lagi mengikuti pola alamiah tentu telah terjadi intervensi **perbuatan manusia** terhadap siklus yang ada. Secara keilmuan kita tahu bahwa alam bekerja dengan prinsip **keseimbangan**, apabila kita merusak sistem keseimbangan tersebut, maka dengan sendirinya alam akan mencari titik keseimbangan baru. Titik baru inilah yang perlu menjadi perhatian pengaturan tata ruang sebagai basis dalam melakukan berbagai langkah pembangunan, agar dapat menghindari kejadian longsor maupun banjir.

Hadirin sekalian.

Persoalan lainnya adalah menyangkut **lokasi** kejadian. Sebenarnya apabila kejadian banjir dan longsor tersebut terjadi di luar kawasan hunian manusia, tentu hal tersebut tidak akan terlalu menjadi masalah. Namun kenyataannya kejadian bencana yang menimpa kita belakangan ini kebanyakan dampaknya terjadi pada lokasi-lokasi hunian atau di sekitar kawasan permukiman dengan kepadatan yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian yang tidak sedikit.

Dalam aspek **lokasi** inilah fungsi Penataan Ruang menjadi penting, karena apabila kita telah menyusun rencana tata ruang dengan kaidah perencanaan yang benar, tentu kita tidak akan menempatkan kawasan hunian atau permukiman di lokasi yang memang secara spasial merupakan lokasi yang berpotensi untuk mengalami bencana. Untuk itu, dalam menyusun perencanaan tata ruang, perlu dilakukan analisis yang mendalam terhadap **kesesuaian lahan**.

Sebagaimana kita ketahui, kawasan rawan longsor umumnya adalah kawasan yang memiliki kemiringan lereng lebih dari 40 persen. Di samping itu meskipun kemiringan 30-40 persen apabila tanahnya serpih dan tingkat curah hujan rata-rata di atas 2500 milimeter per tahun serta ketinggian di atas 1000 meter juga berpotensi longsor. Kawasan rawan longsor umumnya berada pula pada kawasan yang dilewati struktur patahan atau sesar dan jalur gempa yang rawan terhadap terjadinya gerakan tanah. Daerah-daerah yang masuk kategori rawan longsor ini dapat diturunkan melalui analisis terhadap data topografi, geologi lingkungan, geohidrologi, hidrologi maupun faktor-faktor lainnya. Dengan demikian berbagai lokasi rawan longsor yang harus dijaga pemanfaatannya agar tidak digunakan untuk budidaya seperti permukiman dapat diidentifikasi sebagai basis penetapan daerah yang tidak boleh dibangun. Secara lebih luas dapat diketahui pula dari berbagai informasi yang ada tingkat kesesuaian lahan untuk berbagai jenis peruntukan zona. Dengan demikian kita dapat menjawab pertanyaan **dimana kita tidak boleh membangun?; dimana kita boleh membangun dengan syarat?; atau dimana kita boleh mengembangkan kawasan budidaya** sesuai dengan fungsi yang diemban.

Hadirin sekalian.

Dalam konteks Departemen Pekerjaan Umum, penanggulangan bencana banjir dan longsor tersebut tentunya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan **parsial** dan **reaktif** semata. Pendekatan yang digunakan sebaiknya harus lebih menyeluruh dan komprehensif sehingga dapat menyelesaikan **akar permasalahan** secara tuntas.

Untuk itu, dalam mengembangkan upaya penanganan bencana longsor dan banjir, kita perlu merumuskan cara **penanggulangan** untuk mengurangi jumlah korban dan kerugian, serta cara **pencegahan** agar kejadian tersebut tidak terulang lagi di masa mendatang, dengan mengkombinasikan langkah-langkah penanganan, baik pada tahap pra-bencana, tahap selama terjadi bencana, dan tahap pasca bencana.

Terkait penataan ruang, hal yang penting adalahh upaya pencegahan agar bencana serupa tidak terulang di masa yang akan datang, dengan menata fungsi lindung, sehingga kawasan yang memang berpotensi rawan longsor atau banjir **tidak dibangun** misalnya untuk kawasan permukiman yang dapat membahayakan jiwa manusia. Bila perlu pemerintah daerah dapat mengusahakan relokasi penduduk yang telah terlanjur bertempat tinggal di sekitar kawasan semacam ini, berbasis rencana tata ruang dengan menggunakan berbagai instrumen insentif – disinsentif. Langkah ini akan terdukung dengan sedang dilakukannya pembahasan RUU Penataan Ruang baru yang mengatur hal tersebut, termasuk diantaranya adanya sanksi bagi yang melanggar maupun yang memberi ijin.

Di samping hal-hal tersebut, tentu dengan menggalakkan gerakan penghijauan menggunakan jenis vegetasi yang tepat di kawasan-kawasan yang memang ditengarai merupakan kawasan rawan longsor, diharapkan dapat mengurangi tingkat kemungkinan kejadian longsor. Seringkali justru aspek-aspek semacam ini merupakan hal yang dibutuhkan untuk menjawab akar masalah yang sesungguhnya dalam mencegah kejadian yang sama di masa yang akan datang, di samping adanya penanganan sipil teknis seperti pembangunan bendungan, bendung, saluran drainase, maupun tembok penahan tanah.

Hadirin sekalian

Saya berharap melalui forum yang sangat baik ini, dapat dirumuskan suatu strategi dan kebijakan yang menyeluruh dalam penanganan masalah bencana longsor dan banjir di negara kita ini, yang berbasis pada penataan ruang. Dengan demikian diharapkan kita dapat mewujudkan ruang Nusantara yang nyaman termasuk aman dari bencana untuk dihuni, namun juga kondusif untuk

melakukan kegiatan produktif, serta berkelanjutan hingga generasi yang akan datang.

Akhirnya, saya ucapkan selamat berlokakarya, semoga apa yang kita lakukan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kita, khususnya dalam menanggulangi bencana banjir dan longsor di tanah air.

Untuk itu dengan mengucapkan **Bismillahirrahmannirahiim** maka dengan ini saya nyatakan lokakarya ini secara resmi dibuka.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkati kita semua. Amien.

Wassalamu 'alaikum Warrahamatullaahi Wabarakatuuh.

Jakarta, 7 Maret 2006

Menteri Pekerjaan Umum

Djoko Kirmanto